

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**REPUBLIK Indonesia**

Minutes of Meeting

**Rapat Konsultasi Forum *Multi Stakeholder Group* (MSG)**

Hari/Tanggal : Rabu, 10 November 2021

Waktu : 09.00 s.d. 12.30 WIB

Agenda : Kesepakatan ***Roadmap EITI Mainstreaming*** dan Upaya

Indonesia terhadap ***Contract Disclosure*** pada Industri Ekstraktif

Tempat : Aston Bogor Hotel & Resort

Bogor Nirwana Residence, Jl Dreded Pahlawan-Bogor

Pimpinan Rapat : Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

# Resume Hasil Rapat

1. Rapat konsultasi MSG dilaksanakan berdasarkan Undangan Sekretaris Jenderal KESDM, Nomor: 350.Und/DI.02/SJD.3/2021. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari:
   1. Pemerintah Pusat: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPMA, SKK Migas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri
   2. Perusahaan dan Asosiasi: Asosiasi Petroleum Indonesia, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, *Indonesian Mining Association*.
   3. Stranas PK dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Tujuan rapat adalah:
   1. Usulan *Roadmap* Pangarusutamaan EITI.
   2. Perkembangan Penyusunan Laporan EITI Indonesia ke-9.
   3. Paparan Hasil Studi Keterbukaan Kontrak Industri Ekstraktif di Indonesia.
3. Forum MSG dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam KESDM dan dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi ESDM, menjelaskan hal-hal berikut:
4. Tujuan Pengarusutamaan EITI :

* Mendorong keterbukaan data yang sistematis, tersedia bagi publik, berasal dari sumber yang valid, yang bermanfaat untuk mendukung pembangunan negara.
* Mengacu pada standar transparansi global dan disepakati oleh Forum *Multi Stakeholder Group.*

1. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

* Persyaratan/Standar EITI 2019.
* Produsen data/ *Stakeholder.*
* Rekomendasi perbaikan menuju pelaksanaan Standar EITI.
* Aktifitas pengarusutamaan.
* Adanya kesepakatan keterbukaan data (tertutup/terbuka).

1. Keputusan Tindak Lanjut Forum MSG:

* Forum MSG memberikan persetujuan secara garis besar atas *Roadmap* yang dipaparkan dalam rapat.
* Penyelesaian Laporan EITI ke-9 diperpanjang 3 bulan. Penyampaian dan publikasi Laporan EITI Indonesia ke-9 terdiri dari tahun fiskal 2019 dan 2020 diperpanjang hingga batas waktu 31 Maret 2022.
* Sekretariat EITI akan mengirimkan surat kepada EITI *Board* untuk perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan Forum MSG.
* Semua anggota Forum MSG ini bersedia mendukung secara aktif proses pengumpulan data ini agar Laporan EITI ke-9 segera dapat diselesaikan.
* Hasil studi dan rekomendasi atas mitigasi risiko keterbukaan kontrak akan ditindaklanjuti dalam pembahasan tim kerja kecil (*task force*) tentang keterbukaan kontrak.
* Sekretariat EITI akan menyelenggarakan pertemuan tindak lanjut dalam bentuk diskusi tim *task force*, untuk pembahasan hasil mitigasi risiko atas keterbukaan kontrak dan langkah mitigasinya.

# Pertanyaan dan Tanggapan dari Forum MSG

## Indonesian Mining Association (IMA)

1. Mengenai kemungkinan perpanjangan laporan EITI ke-9 adalah sesuatu yang sangat masuk akal dan disetujui
2. Hasil Kajian keterbukaan kontrak signifikan adalah:

* Disaggerasi data per-perusahaan.
* Beneficial Ownership.
* *Contract Disclosure.*

1. Disaggerasi data:

* Pembukaan informasi terkait royalti tidak menjadi konsen.
* Penerimaan negara perperusahaan (data sudah ditampilkan dalam lampiran pada laporan EITI dari tahun 2010, sehingga tidak menjadi hambatan untuk royalti.
* Terkait pajak (perlu adanya modifikasi template keterbukaan data data hingga per perusahaan).

1. *Beneficial Ownerhip*:

* Perusahaan akan bervariasi terutama yang go publik dimana saat ini BO diwajibkan jika masuk bursa karena di bursa dibuka *full disclosure*, sehingga tidak masalah dibuka (dalam bursa disampaikan bahwa saham publik diatas 5%, dibuka), namun ada yang lebih jelas, sehingga dalam *roadmap* perlu lebih jelas yaitu dengan adanya *voluntary* untuk membuka dan akan diikuti oleh perusahaan lain.

1. Keterbukaan Kontrak (*Contract Disclosure*) G to B:

* Melakukan edukasi sebelum melakukan kajian-kajian perihal *Contract Disclosure*
* Perusahaan hampir seragam dimana asosiasi sudah melakukan diskusi yaitu adanya kekhawatiran informasi tersebut disepakati tidak tepat diluar konteks jika dibuka publik yaitu fakta dicampur dengan opini sehiggga menjadi kebenaran yang mutlak karena msyarakat saat ini belum siap sehingga perlu adanya edukasi kepada publik atas hasil kajian perlu disebarluaskan
* Adanya data per kasus untuk menjadi perhatian, dan dibutuhkan *pilot project* untuk *voluntary* untuk membuka data. Perlu adanya edukasi terkait kesiapan terhadap masyarakat dan aparat hukum.
* Apek-aspek kesamaan terhadap kajian pemerintah, terkait mitigasi
* Ada kekhawatiran bahwa informasi dapat digunakan secara tidak tepat

1. Melakukan edukasi terhadap *stakeholder* dan perusahaan, untuk pembahasan *Contract Disclosure.*
2. Kebijakan perpanjangan kontrak sangat beresiko terhadap kerugian negara, berdampak kepada biaya pengembaliannya.
3. Keterbukaan ini masih sangat riskan, masih perlu adanya edukasi, kesiapan keterbukaan kontrak juga memerluka kesiapan aparat penegak hukum.
4. Masalah kontrak dengan pihak ketiga menyangkut persaingan usaha.
5. Pemerintah sebagai pemilik sumberdaya, perusahaan mempunyai izin didalamnya.
6. Keuntungan Indonesia mengikuti EITI, apakah sudah sesuai dengan regulasi dan konstitusi yang berlaku.
7. Koordinasi dan sinergitas antar kelembagaan sangat diperlukan.

## Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Perihal *Roadmap* keterbukaan kontrak 100% manfaat untuk Indonesia dari sisi *National Interest* kedepannya untuk tujuan apa, sehingga langkah kebijakan pemerintah dapat memastikan manfaatnya jauh lebih besar dari pada keterbukaan kontrak tersebut.
2. Beneficial Ownership sudah diatur dalam Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tentang Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan Permenkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Kemenkumham bertanggung jawab mengelola informasi BO dari semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia
3. Saat ini pertukaran Informasi masih terbatas, dan diberikan atas dasar permintaan dari Instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan otoritas berwenang
4. Terhadap publikasi data *Beneficial Ownership* dan lintas K/L karena Indonesia adalah anggota FATF, dalam rangka memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia adalah sistem keuangan yang solid dan pencegahan tindakan pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
5. Perlu melakukan pencerahan dari Sekretariat EITI kepada Ditjen AHU terkait arah tujuannya untuk keterbukaan *Beneficial Ownership*

## Kementerian Keuangan

1. Keterbukaan atas kontrak khususnya migas, 2021 Direktorat PNBP telah menjadi *Transparency Fiscal*
2. SKK Migas tidak mewajibkan membuka kontrak KKKS

PWYP

1. Manfaat dari EITI adalah dapat mengetahui pelaporan antara perusahaan dan pemerintah agar tidak terjadi perbedaan data
2. Pengarusutamaan EITI adanya kajian khusus terkait BO dan keterbukaan Kontrak (sejak tahun 2015 sudah dibahas dalam FGD dan PPID sudah pernah dilakukan, namun perlu adanya level kajian adalah mana dokumen yang rahasia satu persatu, per pasal dan mitigasi jika ditutup seperti apa dan hal ini sesuai dengan rekomandasi dari konsultan EITI internasional). Bursa efek amerika mewajibkan membuka kontrak

Hasil Kajian PWYP adalah:

* <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831259/000083125901500022/exh101.txt>

Contoh link yg mencantumkan kontrak freeport di SEC

* [https://pwypIndonesia.org/id/akses-informasi-publik-dan-keterbukaan-kontrak-izin-industri-ekstraktif-di-6-pemerintah-provinsi-di-Indonesia/](https://pwypindonesia.org/id/akses-informasi-publik-dan-keterbukaan-kontrak-izin-industri-ekstraktif-di-6-pemerintah-provinsi-di-indonesia/)
* [https://pwypIndonesia.org/id/peluang-dan-tantangan-keterbukaan-kontrak-dalam-pelaksanaan-standar-eiti/](https://pwypindonesia.org/id/peluang-dan-tantangan-keterbukaan-kontrak-dalam-pelaksanaan-standar-eiti/)
* [https://pwypIndonesia.org/id/kerangka-hukum-keterbukaan-kontrak-migas-dan-minerba-di-Indonesia/](https://pwypindonesia.org/id/kerangka-hukum-keterbukaan-kontrak-migas-dan-minerba-di-indonesia/)
* [https://pwypIndonesia.org/id/keterbukaan-kontrak-dan-pengungkapan-beneficial-ownership/](https://pwypindonesia.org/id/keterbukaan-kontrak-dan-pengungkapan-beneficial-ownership/)

1. Keterbukaan kontrak perlu dibahas pasal-per pasal agar dapat dibuka, informasi mana yang dapat dibuka dan yang tidak dapat dibuka
2. Memberikan justifikasi terhadap kontrak yang sifatnya rahasia
3. Dokumen izin pertambangan adalah dokumen terbuka
4. Bagaimana publikasi untuk migas, karena sektor minerba saat ini sudah ada MODI dan MOMI

## Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)

1. Edukasi untuk pelaporan EITI ini untuk apa, keuntungan bagi perusahaan apa, sebelum ada edukasi bisa diadakan paparan terlebih dahulu.
2. Keuntungan EITI perlu disosialisasikan kepada masyarakat, manfaat keterlibatan ini perlu direviu manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam organisasi Internasional, kegunaan dalam pelaporan EITI ini seperti apa kepada perusahaan sehingga perlu adanya edukasi (melibatkan yang lebih besar dan timeline perlu ada), dan sosialisasi hasil laporan EITI serta hasil studi kepada perusahaan.
3. Laporan tidak hanya sekedar input, tetapi perlu melibatkan lebih banyak pihak untuk menyamakan persepsi
4. Mempromosikan laporan ini sehingga banyak yang lebih mengetahui manfaat dari EITI
5. Data dari perusahaan saat ini yang sudah diinput di MOMS

## Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)

1. Dalam menyikapi suatu standar *requirement*, untuk 2.4 *Contract Disclosure* terdapat *Contract* dan *License*, apakah pemerintah bisa memberikan salah satu atau keduanya
2. Perlu dicermati dan dikaji *requirement* dari standar pada EITI konteks definisi kontrak/lisensi terutama rezimnya di Minerba.
3. Definisi transparansi komunikasi etis dan efektif adanya kesepahaman informasi, sehingga perlu adanya edukasi kesepahaman terlebih dahulu kepada masyarakat dan izin yang sudah dikeluarkan sudah sesuai agar tidak terjadi polemik agar tidak terjadi asimetrik informasi.
4. Metodelogi keterbukaan kontrak perlu dijabarkan dari konsultan EITI Internasional dan perlu ditelaah jika dibuka kontrak, apakah dampaknya dari permasalahan tersebut.
5. *Full text* dokumen jika dibuka perlu dicermati juga dari sisi regulasi pada pasal-pasal dalam UUD 1945 dan Pancasila untuk menjaga ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat, serta isi dari kontrak tersebut.
6. Definisi kontrak dan liesensi dari sisi Indonesia ikut atau tidak, kecuali kita bisa bernegosiasi menjadi *Semi Disclosure*
7. Definisi transparency adalah komunukasi aktif yang efektif
8. Apakah semua kontrak yang sudah diberi izin sudah memenuhi kebenaran informasi
9. Terdapat Resiko yaitu *Asymmetric Information*, *Comparative Advantage*, *Competitive Advantage*

## Indonesia Petroleum Association (API)

1. Semua informasi hulu migas milik negara, dan KKKS tidak berhak memberikan ke pihak ke-3
2. Tindakan pembukaan data dari kontraktor perlu persetujuan dari KESDM
3. Terkait data penerimaan negara dan produksi sudah diberikan ke Pemerintah, sehingga perlu dikonfimasi ke pemerintah

## Ditjen Mineral dan Batubara KESDM

1. Mengimplementasikan COP untuk energi terbarukan pada 2030
2. Mengurangi pemanfaatan batubara, tidak selalu mengikuti kebijakan dunia
3. Tidak semua kontrak dapat dibuka secara keseluruhan
4. Perlu adanya sanksi dan *reward* jika kita mematuhi pelaporan EITI. Contoh salah satu *reward*, diberikan hibah untuk mengikuti kebijakan-kebijakan dunia.
5. Data BO saat ini sebaiknya dibuka pada level pemilik saham

## DJPK Kementerian Keuangan

1. Dalam konteks *Transparency* *User* dari data atau *audience*, data EITI ini akan dipublikasikan ke masyarakat mana
2. Data formula alokasi DBH bisa diejelaskan seperti apa dan turunannya
3. Kebutuhan data untuk standar EITI agar dikirimkan surat untuk kebutuhan audit internal Kementerian Keuangan
4. Data alokasi bisa dibuka secara luas
5. Data pajak daerah terdapat didalam data APBD
6. Data yang akan diambil di level berapa dan akun mana, maka dari itu diperlukan pemetaan terkait jenis data apa saja yang diperlukan

## SKK Migas

1. *Transparency* bisa diganti dengan akuntabilitas
2. Rumus alokasi DBH berdasarkan lokasi sumur. Data Sumur setiap daerah, berbeda dengan daerah lain, jadi tidak akan pernah sama rumusnya
3. Data migas adalah bagian sumberdaya alam, tidak boleh data diletakan di luar negeri, bukan berarti tidak bisa dengan keterbukaan, tapi akuntabiltas lebih baik
4. *Quantity Assurance* sedang dibuat oleh SKK Migas
5. Telah melakukan kajian terhadap keterbukaan kontrak 175 kontrak dan lebih dari 175 perusahaan dan adanya klausul tidak membuka di bab 5 yaitu untuk tidak membuka kontrak, dan mengingat sudah dimiliki pemerintah dan suddah disampaikan ke KESDM. Namun karena adanya perbedaan negara dimana perusahan itu terbentuk, karena dengan adanya EITI ini membantu persaingan dalam investasi di Indonesia
6. Perlu diskusi lebih dalam per pasal terkait keterbukaan kontrak
7. Saat ini informasi pada website SKK Migas untuk produksi migas sudah ada, namun jika ada yang perlu *disclose* informasi apa saja

Ditjen Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan

1. Sesuai keputusan kasasi, SKK Migas tidak mengungkap kontrak kerja sama karena tidak termasuk informasi public dan sudah disampaikan ke KESDM,
2. Berdasarkan hasil Penilaian BPK dalam kegiatan transparansi fiskal 4 pilar keterbukaan kontrak masih berada pada level *basic*.

## Konsultan EITI International

1. Bukan dokumen kontrak yang menjadi *confidential*
2. Perlu diskusi dalam *working group*
3. Terdapat resiko dan itu yang harus didiskusikan cara mitigasi resiko tersebut

# Tindak Lanjut Forum MSG

1. Sekretariat EITI akan mengirimkan surat kepada EITI *Board* untuk perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan forum MSG.
2. Semua anggota Forum MSG ini bersedia mendukung secara aktif proses pengumpulan data ini agar Laporan EITI ke-9 segera dapat diselesaikan.
3. Hasil studi dan rekomendasi atas mitigasi risiko keterbukaan kontrak akan ditindaklanjuti dalam pembahasan tim kerja kecil (*task force*) tentang keterbukaan kontrak.
4. Sekretariat EITI akan menyelanggarakan pertemuan tindak lanjut dalam bentuk diskusi tim task force, untuk pembahasan hasil mitigasi risiko atas keterbukaan kontrak dan langkah mitigasinya

**Catatan:**

**Bahan Paparan (tersedia pada https://bit.ly/3bxPEmd)**

**Lampiran Foto Kegiatan**

A group of people sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence

Graphical user interface, website

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

A screenshot of a computer

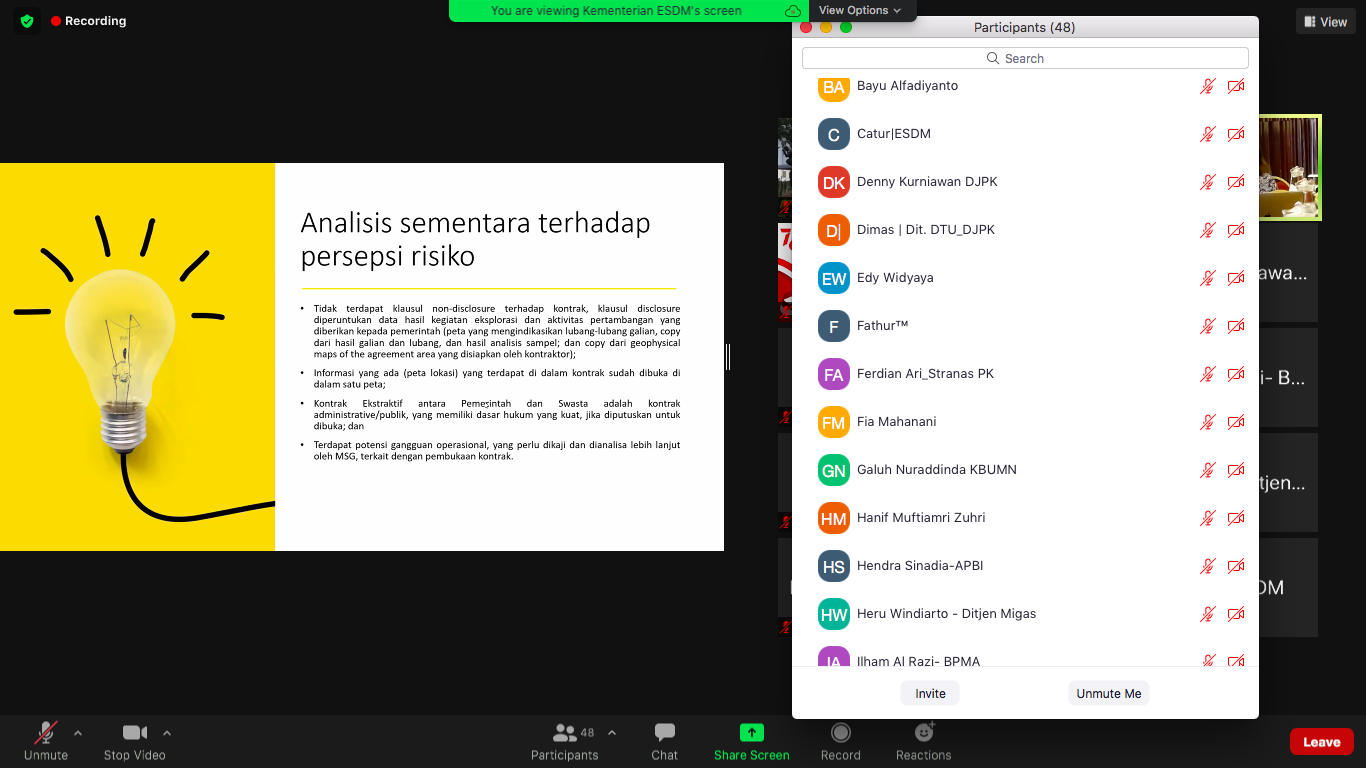
Description automatically generated with medium confidence

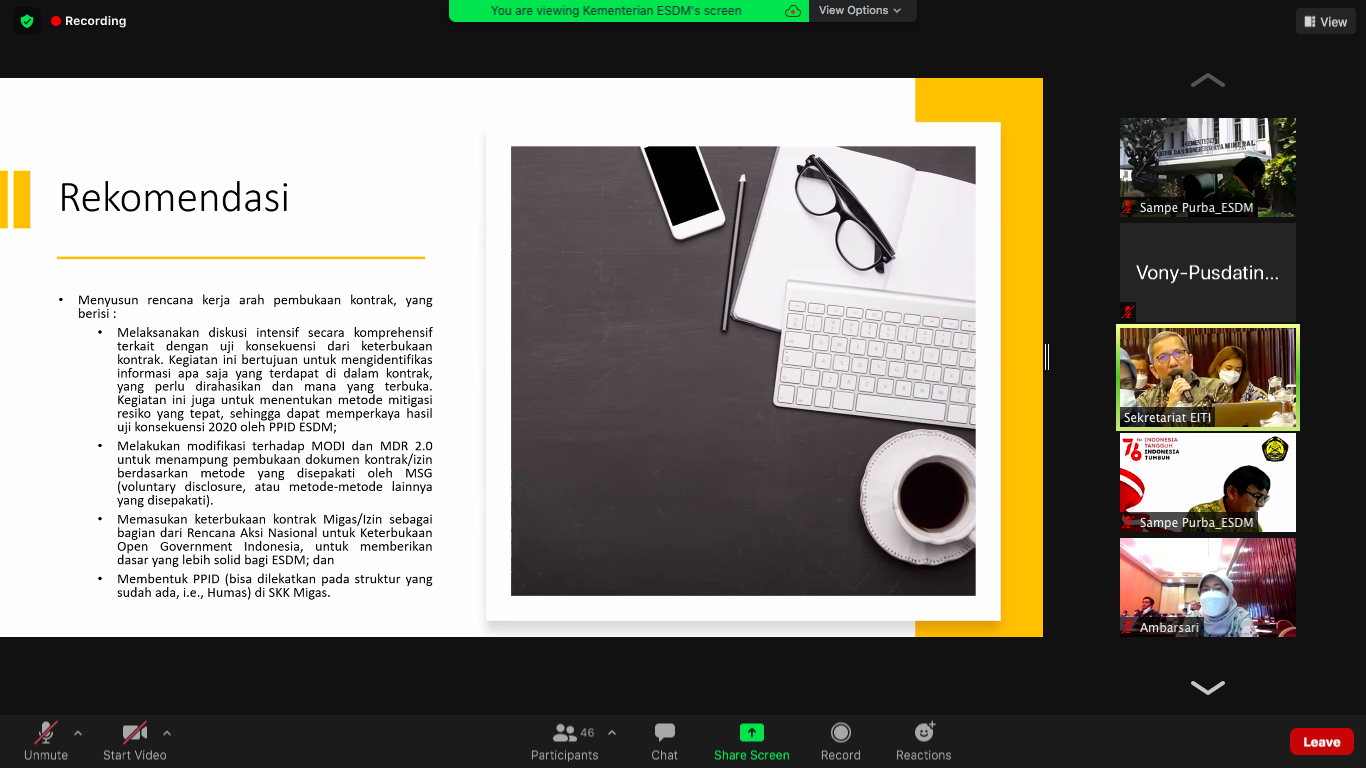
A screen shot of a computer

Description automatically generated with low confidence

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence



****

****